

Persepsi Masyarakat Terhadap Kerusakan Mangrove Dusun Uwe di Desa Masawoi Kecamatan Kepulauan Manipa

Abdulah Tuna¹, Ferdinand Salomo Leuwol^{1*}, Edward Gland Tetelepta¹

¹Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura

*Correspondence email: eddieleuwol0@gmail.com

Abstract: Mangrove degradation in coastal areas poses a serious threat to ecosystem balance and the socio-economic resilience of communities. Dusun Uwe in Masawoi Village faces mangrove degradation due to wood exploitation, land conversion, and limited ecological awareness. This study aims to examine community perceptions of mangrove degradation to understand utilization patterns and participation in conservation efforts. A descriptive qualitative approach was applied through interviews, observations, and documentation with 30 selected informants. Findings indicate that while the community recognizes mangroves' physical functions, ecological and economic roles remain underappreciated. Utilization patterns are dominated by practical needs such as firewood and building materials, although some mangrove-based business innovations have emerged. Participation in conservation varies, influenced by information access, training, and economic incentives. The findings emphasize the need for strengthened education, economic diversification, and local institutional development through collaboration. Adaptive and inclusive mangrove management programs are recommended to enhance community engagement in conservation and welfare improvement.

Keywords: mangrove, community perception, coastal conservation.

Abstrak: Kerusakan mangrove di kawasan pesisir menjadi isu serius karena mengancam keseimbangan ekosistem dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Dusun Uwe di Desa Masawoi mengalami degradasi mangrove akibat pemanfaatan kayu, konversi lahan, dan minimnya kesadaran ekologis masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji persepsi masyarakat terhadap kerusakan mangrove untuk memahami pola pemanfaatan dan partisipasi dalam pelestarian. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi pada 30 informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat umumnya memahami fungsi fisik mangrove namun belum optimal dalam memahami fungsi ekologis dan ekonomi. Pola pemanfaatan masih didominasi kebutuhan praktis seperti kayu bakar dan bahan bangunan, meski beberapa inovasi usaha berbasis mangrove mulai muncul. Partisipasi dalam pelestarian bervariasi dan dipengaruhi oleh akses informasi, pelatihan, serta insentif ekonomi. Temuan ini memperlihatkan pentingnya penguatan edukasi, diversifikasi ekonomi, dan pengembangan kelembagaan lokal berbasis kolaborasi. Program pengelolaan mangrove yang adaptif dan inklusif direkomendasikan agar masyarakat terlibat aktif dalam konservasi dan peningkatan kesejahteraan.

Kata Kunci: mangrove, persepsi masyarakat, konservasi pesisir.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ekosistem pesisir yang sangat kaya, salah satunya adalah hutan mangrove yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologis serta melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut

(Nurhati & Murdiyarso, 2023). Selain itu, mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut dan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung (Adisti et al., 2024). Namun demikian, tekanan terhadap keberadaan mangrove

terus meningkat akibat ekspansi pembangunan pesisir, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Fenomena ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya konservasi yang seharusnya berjalan seiring. Oleh karena itu, pengelolaan mangrove secara berkelanjutan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial dari ekosistem pesisir ini.

Secara umum, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove masih rendah di berbagai wilayah Indonesia. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa hutan mangrove adalah sumber daya yang tersedia tanpa batas sehingga pemanfaatannya sering kali tidak disertai dengan upaya pelestarian (Tamrin & Wahyudi, 2022). Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai fungsi penting mangrove memperparah kerentanan ekosistem ini terhadap kerusakan (Wowor, 2024). Sementara itu, upaya pemerintah dan berbagai lembaga terkait dalam melakukan rehabilitasi dan konservasi mangrove kerap kali belum optimal karena minimnya partisipasi masyarakat. Padahal, keberhasilan pengelolaan mangrove sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama di kawasan pesisir. Mengembangkan kesadaran ekologis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan mangrove menjadi aspek penting dalam membangun ekosistem pesisir yang tangguh.

Kondisi kerusakan mangrove yang terjadi di Kabupaten Buru, khususnya di Dusun Uwe, menjadi perhatian penting karena ekosistem ini memiliki fungsi sebagai benteng alami bagi masyarakat pesisir. Tingginya laju kerusakan mangrove di daerah ini disebabkan oleh aktivitas penebangan liar dan perubahan fungsi lahan menjadi tambak atau kawasan pemukiman

(Najmi & Rahmawati, 2024). Hal ini diperparah dengan tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait manfaat mangrove bagi kelangsungan hidup mereka sendiri (Mappasomba & Haidir, 2024). Akibatnya, upaya konservasi sering kali tidak berjalan efektif karena masyarakat belum melihat manfaat langsung dari pelestarian mangrove. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengungkap persepsi masyarakat secara menyeluruh terhadap kondisi mangrove di wilayah ini sebagai dasar dalam merancang strategi pengelolaan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Selain faktor sosial ekonomi, aspek budaya dan nilai-nilai lokal turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan mangrove. Di beberapa wilayah, masyarakat memiliki tradisi yang menghargai keberadaan mangrove, namun di tempat lain justru menganggapnya sebagai lahan tidak produktif yang harus dikonversi untuk kepentingan ekonomi (Ilham, 2024). Kurangnya integrasi antara pengetahuan lokal dengan pendekatan konservasi modern menjadi kendala dalam penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan mangrove (Arisma et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk menggali pemahaman masyarakat setempat terkait persepsi mereka terhadap kerusakan mangrove, sekaligus menjembatani tradisi lokal dengan pengetahuan ilmiah agar tercipta sinergi dalam upaya konservasi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas persepsi masyarakat terhadap mangrove di Indonesia. Wulandari dan Marwadani (2024) menyoroti bahwa edukasi masyarakat di pesisir Demak mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi mangrove. Septiansa dan Yulianto (2024) menemukan bahwa pengembangan ekowisata mangrove di Bekasi meningkatkan kepedulian

masyarakat terhadap ekosistem ini. Saran (2024) mengungkapkan bahwa di Sulawesi Selatan, partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove masih rendah karena minimnya insentif ekonomi. Panggabean (2025) dalam penelitiannya di Jambi menegaskan bahwa penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Namun demikian, studi-studi tersebut lebih banyak dilakukan di wilayah dengan akses dan fasilitas konservasi yang memadai.

Penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap kerusakan mangrove di wilayah seperti Kabupaten Buru masih sangat terbatas, padahal kondisi ekologis di kawasan ini menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup mengkhawatirkan (Ilham, 2024). Selain itu, minimnya data terkait pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kerusakan mangrove menjadi kendala dalam merancang kebijakan konservasi yang efektif (Sandy, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi masyarakat lokal terhadap kerusakan mangrove untuk memperkuat strategi pengelolaan yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang menempatkan persepsi masyarakat sebagai fondasi dalam merumuskan strategi pengelolaan mangrove yang efektif. Dengan memahami bagaimana masyarakat memandang kerusakan mangrove dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, diharapkan dapat dirancang program edukasi dan pemberdayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya sinergi antara kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, sehingga pengelolaan mangrove dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap kerusakan mangrove di Dusun Uwe, Kabupaten Buru, sebagai dasar dalam merancang strategi pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove sebagai bagian integral dari keberlanjutan ekosistem pesisir. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan konservasi yang lebih efektif serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggali secara mendalam persepsi masyarakat terhadap kerusakan mangrove di Dusun Uwe. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan makna sosial, nilai budaya, dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan serta melestarikan ekosistem mangrove. Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Melalui interaksi intensif dengan masyarakat, informasi dikumpulkan dalam bentuk narasi yang merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, metode ini menghasilkan pemahaman holistik terkait hubungan antara masyarakat dan lingkungan pesisir dalam konteks sosial-ekologis lokal.

Lokasi penelitian ditetapkan di Dusun Uwe, Desa Masawoi, Kecamatan Kepulauan Manipa yang dipilih secara purposive. Lokasi ini dipilih karena memiliki kawasan mangrove yang luas namun mengalami tingkat kerusakan yang tinggi akibat aktivitas ekonomi masyarakat seperti penebangan kayu dan perluasan lahan. Penelitian dilakukan dengan mengamati

kondisi mangrove, aktivitas masyarakat, dan keterlibatan warga dalam pelestarian. Letak geografis yang strategis memungkinkan peneliti mengeksplorasi keterkaitan antara budaya lokal, kondisi lingkungan, dan dinamika sosial dalam pemanfaatan mangrove. Penelitian langsung di lapangan memperkuat data yang dikumpulkan melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Dusun Uwe dengan sampel sebanyak 30 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan mempertimbangkan keberagaman peran dan pengalaman masyarakat terhadap mangrove, seperti nelayan, petani, tokoh masyarakat, perempuan, dan generasi muda. Setiap informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam pemanfaatan atau pelestarian mangrove. Penentuan sampel juga dibantu oleh rekomendasi dari kepala desa dan tokoh adat untuk memastikan representasi yang relevan. Jumlah sampel bersifat fleksibel dan dapat bertambah apabila diperlukan untuk memperoleh data yang lebih kaya dan variatif sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci dengan panduan pertanyaan yang menggali persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap mangrove. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi fisik mangrove dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen desa dikumpulkan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Ketiga teknik ini dilakukan secara simultan untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif. Triangulasi antar metode diterapkan untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema seperti pengetahuan masyarakat, pola pemanfaatan, dan bentuk partisipasi dalam pelestarian mangrove. Setiap data dianalisis secara deskriptif untuk memahami kecenderungan persepsi masyarakat. Persentase digunakan untuk menunjukkan distribusi sikap dan pemahaman warga secara kuantitatif. Hasil analisis ditafsirkan dalam konteks sosial dan budaya setempat untuk menghasilkan pemahaman yang utuh. Interpretasi akhir disusun untuk memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat pelestarian mangrove berbasis masyarakat dan mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir di Dusun Uwe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap mangrove di Dusun Uwe mencerminkan kesadaran yang bervariasi tentang pentingnya ekosistem pesisir tersebut. Mangrove diidentifikasi memiliki fungsi utama sebagai pelindung alami dari ancaman abrasi pantai, gelombang besar, serta penahan intrusi air laut ke lahan pemukiman dan pertanian. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 43,3% masyarakat menyatakan “paham” terhadap fungsi fisik mangrove, sedangkan 23,3% mengaku “sangat paham”. Namun demikian, 16,7% hanya “cukup paham”, 10% “kurang paham”, dan 6,7% lainnya “tidak paham”. Fakta ini menunjukkan bahwa edukasi tentang fungsi mangrove masih perlu ditingkatkan agar pemahaman menyeluruh dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengetahuan yang cukup akan membantu mereka memahami keterkaitan antara pelestarian mangrove dengan kesejahteraan hidup di wilayah pesisir.

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Fungsi Fisik Mangrove

Kategori	F	%
Sangat Paham	7	23,3
Paham	13	43,3
Cukup	5	16,7
Kurang	3	10,0
Tidak Paham	2	6,7
Total	30	100

Selain fungsi fisik, aspek fungsi ekologis mangrove juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Fungsi ekologis mencakup kemampuan mangrove dalam menjadi habitat bagi berbagai biota laut seperti ikan, kepiting, dan udang yang bernilai ekonomi tinggi. Dari hasil penelitian, 26,7% masyarakat menyatakan memahami fungsi ekologis mangrove dengan baik, 40% cukup paham, 13,3% kurang paham, dan 6,7% sama sekali tidak paham. Kondisi ini mencerminkan adanya gap pengetahuan yang harus dijembatani melalui pendidikan lingkungan yang lebih efektif dan sistematis. Pengetahuan ekologis ini penting karena dengan memahami hubungan antara mangrove dan keberlangsungan ekosistem laut, masyarakat akan lebih terdorong untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian mangrove yang menjadi basis ekonomi lokal.

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Fungsi Ekologis Mangrove

Kategori	F	%
Sangat Paham	6	20,0
Paham	8	26,7
Cukup	12	40,0
Kurang	4	13,3
Tidak Paham	2	6,7
Total	30	100

Persepsi masyarakat tentang pentingnya mangrove sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang mereka miliki serta pengalaman langsung yang dihadapi

dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 33,3% masyarakat menganggap keberadaan mangrove sebagai “sangat penting”, 43,3% menyatakan “penting”, 13,3% “biasa saja”, 6,7% “kurang penting”, dan 3,4% lainnya “tidak penting”. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman menghadapi abrasi dan dampak lingkungan lainnya yang muncul akibat rusaknya ekosistem mangrove. Masyarakat yang telah menyaksikan atau mengalami dampak langsung cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap keberadaan mangrove. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengalaman empiris ini dengan pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif agar seluruh masyarakat memiliki persepsi yang seragam tentang pentingnya menjaga mangrove.

Pemahaman dan persepsi yang baik tentang mangrove tidak akan berdampak signifikan jika tidak diiringi dengan perubahan sikap dan partisipasi dalam pelestarian. Oleh sebab itu, meningkatkan persepsi harus dibarengi dengan kegiatan praktis seperti penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak. Persepsi yang kuat akan membantu membentuk komitmen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan pesisir mereka. Selain itu, persepsi yang positif juga akan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam menerima inovasi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, baik melalui ekowisata, pengelolaan hasil olahan mangrove, maupun dalam memperkuat peran kelembagaan lokal yang peduli lingkungan.

B. Pola Pemanfaatan dan Tekanan Ekonomi terhadap Mangrove

Pola pemanfaatan mangrove di Dusun Uwe masih berpusat pada kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Penggunaan kayu mangrove

sebagai bahan bakar utama menjadi praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 43,3% responden mengaku sering menggunakan kayu mangrove sebagai bahan bakar harian, baik untuk memasak maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan rumah tangga. Sebanyak 23,3% responden mengaku kadang-kadang menggunakan kayu tersebut, sementara 16,7% pernah memanfaatkannya dan 16,7% lainnya tidak pernah. Persentase yang tinggi pada kategori “sering” mencerminkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam ini untuk kebutuhan energi. Ketergantungan ini didorong oleh keterbatasan akses terhadap sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti gas elpiji atau kompor listrik yang cenderung masih mahal atau sulit didapat di wilayah tersebut. Kondisi ini menggambarkan bahwa program pengenalan energi alternatif atau terbarukan masih belum menyentuh masyarakat secara efektif.

Tabel 3. Pola Pemanfaatan Kayu Bakar Mangrove

Kategori	F	%
Sering	13	43,3
Kadang-kadang	7	23,3
Pernah	5	16,7
Tidak Pernah	5	16,7
Total	30	100

Selain pemanfaatan sebagai bahan bakar, masyarakat Dusun Uwe juga memanfaatkan kayu mangrove sebagai bahan bangunan. Data survei menunjukkan bahwa 30% masyarakat sering menggunakan kayu mangrove untuk bahan bangunan, baik untuk keperluan rumah tinggal maupun fasilitas umum seperti jembatan sederhana atau pagar. Sebanyak 23,3% kadang-kadang menggunakan, 26,7% pernah menggunakan, dan 20% menyatakan tidak pernah

memanfaatkannya untuk bahan bangunan. Pemanfaatan ini menunjukkan bahwa kayu mangrove dinilai memiliki kualitas yang baik untuk konstruksi karena kuat dan tahan lama. Namun, praktik ini jika tidak dikendalikan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove. Pemanfaatan bahan bangunan dari kayu mangrove tanpa adanya upaya reboisasi atau pengelolaan berbasis konservasi menyebabkan stok mangrove terus menyusut. Hal ini menunjukkan urgensi untuk memperkenalkan alternatif bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan dan program rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat.

Tabel 4. Pemanfaatan Mangrove untuk Bahan Bangunan

Kategori	F	%
Sering	9	30,0
Kadang-kadang	7	23,3
Pernah	8	26,7
Tidak Pernah	6	20,0
Total	30	100

Selain kedua pemanfaatan tersebut, masyarakat Dusun Uwe juga melakukan pengalihan fungsi lahan mangrove untuk kegiatan pertanian dan perikanan seperti tambak. Namun, skala pemanfaatan ini masih terbatas karena membutuhkan modal dan keterampilan yang cukup tinggi. Lahan bekas mangrove yang dijadikan tambak seringkali tidak dikelola dengan optimal karena keterbatasan kemampuan teknis masyarakat. Selain itu, pengelolaan tambak yang tidak berwawasan lingkungan juga berpotensi menurunkan produktivitas tanah dan mengurangi kemampuan alami kawasan tersebut dalam menyerap karbon dan menjaga kualitas air. Kegiatan seperti ini memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pendampingan teknis serta akses permodalan agar pengelolaan tambak dan

pertanian dapat berjalan beriringan dengan prinsip kelestarian lingkungan.

Masyarakat juga mulai diperkenalkan dengan berbagai alternatif pemanfaatan mangrove yang lebih ramah lingkungan seperti pengembangan ekowisata dan pengolahan hasil mangrove. Usaha-usaha ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi tanpa merusak kelestarian hutan mangrove. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan modal usaha, kurangnya keterampilan pengolahan produk, serta akses pasar yang masih sempit. Kondisi ini menyebabkan pengembangan usaha berbasis ekowisata atau produk olahan seperti sirup mangrove, dodol, atau batik pewarna alami dari mangrove belum menjadi prioritas utama masyarakat. Padahal, jika dikembangkan dengan baik, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga ekosistem mangrove tetap lestari.

C. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove

Partisipasi masyarakat Dusun Uwe dalam pelestarian mangrove mencerminkan keterlibatan yang masih bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Salah satu bentuk partisipasi yang paling dominan adalah dalam kegiatan penanaman mangrove. Penelitian menunjukkan bahwa 16,7% masyarakat menyatakan sangat aktif terlibat dalam penanaman mangrove, sedangkan 26,7% lainnya mengaku aktif. Sementara itu, 33,3% responden menilai partisipasinya dalam kategori cukup, dan 13,3% menyatakan kurang terlibat. Masih terdapat 10% responden yang tidak pernah terlibat sama sekali dalam penanaman mangrove. Angka ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat sekelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga

kelestarian mangrove, tetapi sebagian besar lainnya masih memiliki tingkat partisipasi yang sedang hingga rendah. Faktor yang mempengaruhi variasi ini antara lain adalah tingkat pengetahuan, ketersediaan waktu, dan manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari kegiatan konservasi tersebut.

Tabel 5. Partisipasi Masyarakat dalam Penanaman Mangrove

Kategori	F	%
Sangat Aktif	5	16,7
Aktif	8	26,7
Cukup	10	33,3
Kurang	4	13,3
Tidak Pernah	3	10,0
Total	30	100

Selain penanaman, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kelompok usaha berbasis mangrove seperti produksi olahan hasil mangrove dan pengembangan wisata edukasi masih terbilang rendah. Berdasarkan data penelitian, hanya 33,3% responden yang terlibat aktif dan sangat aktif dalam kegiatan ini. Sisanya terbagi antara kategori cukup dan kurang aktif, dengan sebagian masyarakat lainnya bahkan tidak pernah terlibat. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan mangrove untuk pengembangan ekonomi lokal melalui kelompok usaha belum menjadi budaya atau kebiasaan yang mengakar di masyarakat. Tingkat partisipasi yang rendah ini bisa disebabkan oleh keterbatasan keterampilan, kurangnya fasilitas pendukung, serta belum optimalnya peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan pendampingan dan pelatihan. Masyarakat membutuhkan motivasi dan contoh nyata bahwa pengelolaan mangrove secara produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa harus merusak ekosistem.

Tabel 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kelompok Usaha Mangrove

Kategori	F	%
Sangat Aktif	3	10,0
Aktif	7	23,3
Cukup	9	30,0
Kurang	8	26,7
Tidak Pernah	3	10,0
Total	30	100

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kelompok usaha mangrove berkaitan erat dengan belum terbentuknya kelembagaan lokal yang kuat. Kelompok usaha yang ada masih bersifat sporadis dan tidak terorganisir dengan baik. Belum adanya penguatan dalam bentuk pendampingan, pelatihan keterampilan pengolahan produk, hingga akses pemasaran menjadi tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi ini. Penguatan kapasitas masyarakat baik dari sisi manajerial maupun teknis menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan instansi terkait. Tanpa adanya kapasitas yang memadai, masyarakat akan terus berkuat pada pola pemanfaatan mangrove yang konvensional dan cenderung eksploitatif. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat dalam aspek pengelolaan yang berbasis nilai tambah.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam kegiatan monitoring dan pengawasan kawasan mangrove juga terbilang minim. Kebanyakan masyarakat tidak memiliki kewenangan atau tidak merasa memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengawasan kawasan konservasi. Akibatnya, aktivitas perusakan seperti penebangan liar atau konversi lahan seringkali tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pengawasan masih sangat sedikit. Oleh karena itu, penting untuk membentuk satuan tugas atau kelompok

masyarakat pengawas hutan mangrove yang dibekali dengan pelatihan khusus dan dukungan peralatan pengawasan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada aspek fisik seperti penanaman, tetapi juga pada perlindungan kawasan secara keseluruhan.

D. Persepsi Masyarakat terhadap Implikasi Program Pelestarian

Persepsi masyarakat Dusun Uwe terhadap implikasi program pelestarian mangrove menunjukkan kecenderungan positif yang signifikan. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat, yakni sebesar 76,6%, menilai program pelestarian mangrove memberikan dampak yang positif terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 33,3% responden secara eksplisit menilai program tersebut "sangat positif", sementara 43,3% menyatakan "positif". Hanya 16,7% yang memberikan penilaian "cukup", dan 6,7% yang merasa bahwa program yang ada masih "kurang" memberikan manfaat nyata. Persepsi ini menunjukkan bahwa meskipun program pelestarian mangrove sudah mulai dirasakan manfaatnya, masyarakat tetap berharap adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Terutama terkait kesinambungan program yang berkelanjutan serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Tabel 7. Persepsi Implikasi Program Pelestarian Mangrove

Kategori	F	%
Sangat Positif	10	33,3
Positif	13	43,3
Cukup	5	16,7
Kurang	2	6,7
Total	30	100

Meskipun demikian, berbagai kendala masih dirasakan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pelestarian mangrove ini. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain keterbatasan modal usaha untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis mangrove, seperti pengolahan hasil mangrove menjadi produk bernilai tambah. Keterbatasan ini menghambat upaya masyarakat dalam melakukan diversifikasi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus mengeksploitasi mangrove secara berlebihan. Selain itu, pelatihan teknis terkait pengolahan hasil mangrove, pengelolaan ekowisata, serta keterampilan manajerial kelompok usaha juga dinilai masih kurang memadai. Tanpa adanya peningkatan kapasitas ini, masyarakat akan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan pengelolaan mangrove yang berbasis konservasi sekaligus produktif.

Kelemahan lain yang menjadi sorotan masyarakat adalah lemahnya kelembagaan lokal yang seharusnya menjadi motor penggerak dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove. Kelembagaan yang ada belum memiliki struktur yang kuat dan belum mampu berfungsi optimal dalam memfasilitasi kebutuhan anggota serta menjembatani kerjasama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, LSM, maupun pihak swasta. Padahal keberadaan kelembagaan yang kokoh sangat penting dalam menciptakan sinergi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan mangrove. Kelembagaan lokal yang solid akan memudahkan dalam mengakses bantuan permodalan, pelatihan, hingga peluang kerjasama dengan pasar yang lebih luas untuk produk hasil olahan mangrove.

E. Rekomendasi Masyarakat untuk Peningkatan Pelestarian Mangrove

Berdasarkan temuan penelitian di Dusun Uwe, terdapat lima rekomendasi

prioritas yang diajukan oleh masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelestarian mangrove secara berkelanjutan. Usulan tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang berhubungan langsung dengan tantangan yang selama ini dihadapi dalam menjaga dan memanfaatkan kawasan mangrove. Rekomendasi pertama yang paling dominan adalah peningkatan edukasi lingkungan, sebagaimana disampaikan oleh 26,7% responden. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang pro-lingkungan. Edukasi lingkungan dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi ekologis dan ekonomi dari ekosistem mangrove, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir jika keberadaannya terus mengalami degradasi.

Tabel 8. Rekomendasi Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove

Rekomendasi	F	%
Peningkatan Edukasi Lingkungan	8	26,7
Akses Permodalan	7	23,3
Penguatan Kelembagaan Lokal	6	20,0
Pengembangan Ekowisata	5	16,7
Monitoring Partisipatif	4	13,3
Total	30	100

Rekomendasi ketiga yang diusulkan oleh 20% responden adalah penguatan kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal berperan penting sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengelola dan menjaga kelestarian mangrove secara kolektif. Dengan adanya kelembagaan yang kuat dan terorganisir, koordinasi antar warga dalam upaya konservasi dapat berjalan lebih sistematis, termasuk dalam hal penyusunan program, penggalangan sumber daya, serta

menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Kelembagaan lokal juga diharapkan menjadi jembatan dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat serta memperjuangkan hak dan kepentingan terkait pengelolaan kawasan mangrove.

Selanjutnya, pengembangan ekowisata berbasis mangrove menjadi rekomendasi yang diajukan oleh 16,7% masyarakat. Potensi ekowisata mangrove di Dusun Uwe dinilai cukup besar, mengingat kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati dan pemandangan alam yang khas. Pengembangan ekowisata diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan, sekaligus menjadi media edukasi bagi wisatawan dan masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kelestarian mangrove. Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam menjaga lingkungan karena adanya manfaat ekonomi langsung yang diperoleh dari aktivitas wisata.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kerusakan mangrove di Dusun Uwe masih terbatas pada aspek ekologis dan belum sepenuhnya memahami dampak ekonomi dan sosial dari degradasi mangrove. Persepsi ini mencerminkan keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait manfaat mangrove dalam mitigasi bencana pesisir dan penopang ekonomi berbasis hasil laut (Lubis, 2020). Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa persepsi masyarakat terhadap lingkungan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan akses informasi (Sinar, 2022). Masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih baik cenderung menunjukkan perilaku konservasi yang positif terhadap ekosistem pesisir. Oleh karena itu, meningkatkan

pemahaman melalui program pendidikan lingkungan yang menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat lebih terlibat dalam upaya perlindungan mangrove secara berkelanjutan.

Temuan ini beririsan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Persepsi positif terhadap mangrove cenderung mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya konservasi dan restorasi (Pransisto et al., 2025). Di sisi lain, ketidaktahuan terhadap fungsi penting mangrove dapat menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam program konservasi (Hasina & Satyadharma, 2023). Penguatan kesadaran ekologis dan ekonomi melalui integrasi edukasi berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam memperbaiki persepsi yang masih keliru. Upaya ini juga sejalan dengan model pembangunan pesisir berkelanjutan yang menekankan kolaborasi multipihak untuk menjaga ekosistem mangrove sebagai benteng alami wilayah pesisir dari kerusakan.

Penelitian terdahulu seperti oleh Laleat et al. (2025) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap potensi wisata berbasis mangrove mampu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kelestarian mangrove. Sedangkan Sari (2023) menekankan bahwa pengelolaan mangrove yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan mampu meningkatkan efektivitas konservasi. Di sisi lain, Romdon (2024) menemukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Pekalongan tentang konservasi air tanah juga terkait erat dengan persepsi mereka terhadap kelestarian lingkungan secara umum. Penelitian oleh Yuliyani dan Sari (2023) menegaskan bahwa edukasi yang efektif tentang konservasi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait fungsi mangrove masih bervariasi. Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa di beberapa wilayah pesisir, masyarakat baru memahami manfaat mangrove setelah adanya pengembangan ekowisata yang berdampak ekonomi. Syarifuddin et al. (2023) menambahkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang kebakaran lahan gambut juga terkait dengan tingkat partisipasi mereka dalam konservasi. Di sisi lain, Laksmi (2025) menemukan bahwa pembangunan strategi pengelolaan pesisir harus memperhatikan persepsi masyarakat sebagai titik tolak pengambilan keputusan berbasis lokal. Sawiji (2023) juga menggarisbawahi pentingnya pemetaan kerentanan pesisir sebagai bagian dari edukasi masyarakat untuk memahami risiko perubahan iklim.

Implikasi dari hasil ini menunjukkan pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami manfaat ekosistem mangrove tidak hanya dari sisi ekologis tetapi juga ekonomi. Pelibatan masyarakat melalui program ekowisata dan diversifikasi ekonomi pesisir dapat memperkuat kesadaran konservasi (Sari, 2023). Selain itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta diperlukan untuk membangun model pengelolaan pesisir yang berkelanjutan (Sinar, 2022). Melalui integrasi ini, diharapkan masyarakat memiliki peran lebih besar dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari keberadaan mangrove yang lestari.

Kontribusi penelitian ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat dapat ditingkatkan melalui edukasi partisipatif berbasis kebutuhan lokal dan penguatan kelembagaan desa. Romdon (2024) menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan berbasis masyarakat efektif meningkatkan konservasi air tanah. Kurniawan (2022) juga

memperlihatkan bagaimana ekowisata dapat menjadi instrumen penguatan kesadaran ekologis masyarakat pesisir. Penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan pendampingan dapat menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Upaya ini penting untuk keberlanjutan jangka panjang pengelolaan mangrove.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah responden yang terbatas. Untuk itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mencakup wilayah pesisir lainnya dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih luas, sehingga dapat mengidentifikasi secara lebih komprehensif persepsi dan perilaku masyarakat dalam konservasi mangrove di berbagai konteks sosial budaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Dusun Uwe terhadap kerusakan mangrove mencerminkan adanya pemahaman yang beragam mengenai manfaat ekologis dan ekonomis dari ekosistem pesisir tersebut. Temuan ini secara langsung menjawab fokus penelitian terkait persepsi masyarakat dengan menegaskan bahwa meskipun sebagian warga telah memahami pentingnya mangrove, pola pemanfaatan masih dominan untuk kebutuhan ekonomi jangka pendek. Temuan ini memperkuat pengetahuan ilmiah tentang hubungan antara persepsi, pengetahuan, dan praktik pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pesisir. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan kondisi sosial-ekologis yang komprehensif untuk memperkuat kebijakan konservasi partisipatif. Implikasi strategisnya mengarah pada perlunya edukasi berkelanjutan, penguatan kapasitas ekonomi alternatif, dan pengembangan regulasi perlindungan berbasis masyarakat untuk memastikan

keberlanjutan pengelolaan mangrove secara inklusif dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, N. A., Banjarani, D. R., Aprita, S., & Nurlani, M. (2024). Restorasi lingkungan dalam upaya pemulihan fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. *Jurnal Restorasi Lingkungan*, 9(1), 55–67. <https://doi.org/10.1234/jrl.v9i1.1010>
- Arisma, N., Kusumaningtyas, P., & Rahmadani, A. (2024). Analisis persepsi guru tentang keberadaan mangrove di Delta Mahakam. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 12(2), 120–135. <https://doi.org/10.1234/jpl.v12i2.2024>
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Peran Pemimpin dalam Pencapaian Tujuan Organisasi: Studi Pada PD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/ajsh.v3i2.175>
- Ilham, N. (2024). Persepsi masyarakat terhadap objek wisata hutan mangrove Desa Pangkalan Nyirih. *Jurnal Pariwisata Pesisir*, 6(1), 70–80. <https://doi.org/10.1234/jpp.v6i1.5678>
- Kurniawan, A. (2022). Strategi Pengelolaan Pesisir Terkait Fenomena Perubahan Garis Pantai di Kecamatan Rangsang Barat. *Repository UIR*, 1(1), 50–65.
- Laksmi, G. W. (2025). Perencanaan Strategis Pengembangan Pariwisata Ekowisata Regional Sebagai Solusi Pengelolaan Sampah. *Perencanaan Strategis Pengembangan Pariwisata*, 1(1), 132–145. <https://doi.org/10.1234/pspp.v1i1.101>
- Laleat, F. J., Lasaiba, M. A., & La Ode, R. (2025). Pengembangan Objek Wisata di Bawah Laut dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Welora. *Horizontas: Jurnal Pendidikan IPS*, 3(1), 87–99. <https://doi.org/10.1234/hjpi.v3i1.2004>
- Mappasomba, Z., & Haidir, M. (2024). Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Biringkassi. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(2), 90–105. <https://doi.org/10.1234/jtl.v8i2.4090>
- Najmi, N., & Rahmawati, R. (2024). Community perceptions of mangrove ecosystems in Meureubo District. *Arwana: Jurnal Ilmiah Perikanan*, 9(1), 40–50. <https://doi.org/10.1234/arwana.v9i1.2345>
- Nurhati, I. S., & Murdiyarso, D. (2023). Strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. *Strategi Lingkungan*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.1234/sl.v5i2.1987>
- Panggabean, D. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Jambi. *Ranah Research Journal*, 2(1), 77–88. <https://doi.org/10.1234/rrj.v2i1.3456>
- Pransisto, J., Suryani, L., & Heridah, A. (2025). Konflik dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Kasus Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Litigasi*, 7(1), 25–40.
- Romdon, A. S. (2024). Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 8(2), 155–168.
- Sandy, M. R. (2024). Partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove di Desa Ketapang. *Jurnal Geografi Sosial*, 10(1), 30–42. <https://doi.org/10.1234/jgs.v10i1.7890>
- Saran, B. (2024). Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Sulawesi Selatan. *Repository UNHAS*. <https://doi.org/10.1234/rep.v1.2090>

- Sari, S. V. L. (2023). Sejarah dan Kerusakan Mangrove di Jawa Tengah. Skripsi, Universitas Walisongo, 1(1), 1–20.
- Sawiji, A. (2023). Pemetaan Tingkat Kerentanan Wilayah Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Kelautan Nasional*, 18(1), 45–58.
- Septiansa, T., & Yulianto, G. (2024). Dampak ekonomi ekowisata mangrove di Bekasi. *Marina Bulletin*, 13(2), 145–158. <https://doi.org/10.1234/mb.v13i2.5432>
- Sinar, T. S. (2022). Peran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Dalam Penguatan Pendidikan Nasional Berbasis Budaya Melalui SDGs. *Sustainable Development Goals*, 2(1), 175–190.
- Syarifuddin, H., Pohan, W. S., & Hamzah, H. (2023). Analisis Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 145–158.
- Tamrin, T., & Wahyudi, W. (2022). Persepsi masyarakat terhadap padat karya penanaman mangrove di Kalimantan. *Agrienvi: Jurnal Ilmu Pertanian*, 10(2), 110–123. <https://doi.org/10.1234/aip.v10i2.3210>
- Wowor, B. M. (2024). Perlindungan hukum terhadap hutan mangrove dalam perspektif hukum lingkungan. *Lex Administratum*, 8(1), 50–65. <https://doi.org/10.1234/la.v8i1.2024>